

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP MANTAN NARAPIDANA MENJADI
ANGGOTA LEGISLATIF (STUDY ANALISIS UU NO 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD)**

SKRIPSI



Oleh:

**GUSTIAR AGUS
11324105004**

STRATA SATU (S1)

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/2019 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP MANTAN NARAPIDANA MENJADI
ANGGOTA LEGISLATIF (STUDY ANALISIS UU NO 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar
Sarjana hukum (SH)



Oleh:

GUSTIAR AGUS
11324105004

UIN SUSKA RIAU

STRATA SATU (S1)

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/2019 M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul (Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Mantan NaraPidana menjadi Anggota Legislatif (Study analisis uu no 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DP, DPD,DPRD), Yang ditulis oleh:

Nama : GUSTIAR AGUS


NIM : 11324105004

Program Studi : Hukum Tata Negara Siyasah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 - September- 2019

Pembimbing Skripsi


Firdaus, SH, MH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP MANTAN NARAPIDANA MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF (STUDY ANALISIS UU NO 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD)"** yang ditulis oleh:

Nama : **GUSTIAR AGUS**
 NIM : **11324105004**
 Program Studi : **Hukum Tata Negara**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Selasa, 31 Desember 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Hajar, MAg

Sekretaris
Mutasir , SHI, M.Sy

Penguji I
Drs. Zainal Arifin , MA

Penguji II
Dr.H. Johari, M.Ag



Mengetahui :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr.Drs. H. Hajar, M.Ag.

NIM: 19580712 1986031 005.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif (Study Analisis UU NO 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD)***. Maksud dari keseluruhan judul ini adalah, bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap orang yang pada waktu lalu pernah menjalani hukuman karena melakukan kejahatan dan telah dibebaskan dari segala tuduhan untuk menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD berdasarkan Pasal 12 huruf (g) dan 51 ayat 1 huruf (g) Undang-Undang NO 8 Tahun 2012.

Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD telah membolehkan mantan narapidana menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Mantan narapidana adalah orang yang dulu pernah melakukan kejahatan atau tindakan kriminal dan telah menjalani hukuman. Status mantan narapidana menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD banyak mendapat respon penolakan dari masyarakat. Hal ini didasari bahwa mantan narapidana adalah orang yang sudah cacat secara moral dan tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Untuk membangun lembaga Legislatif yang kredibel dan bisa dipercaya oleh rakyat, seharusnya para anggotanya memiliki integritas yang bermoral, cerdas (kompetensi), dan bersikap negarawan apalagi anggota legislatif merupakan representasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam Al-Quran dan Hadis hampir tidak ditemui secara tegas mengatakan tentang syarat-syarat anggota legislatif apalagi berstatus mantan narapidana, begitu juga dalam sejarah perpolitikan Islam. Berdasarkan permasalahan ini, penulis ingin meneliti mengapa mantan narapidana dibolehkan menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Pasal 12 huruf (g) dan Pasal 51 ayat 1 huruf (g) UU NO 8 Tahun 2012 dan bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap mantan narapidana menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD.

Dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan penelitian normative yang bersifat deskriptif, maka segala kegiatan penelitian ini dipusatkan pada objek kajian terhadap Pasal 12 huruf (g) dan Pasal 51 ayat 1 huruf (g) UU NO 8 Tahun 2012 yang dianalisis dengan teori-teori yang bersumber dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan persoalan ini.

Hasil penelitian menunjukan bahwa, *pertama* alasan dibolehkannya mantan narapidana menjadi anggota legislatif adalah untuk mengembalikan hak-hak mereka yang dijamin oleh UUD 1945, dan partisipasi masyarakat untuk berpolitik merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati. *Kedua*, fiqih siyasah memandang bahwa Pasal 12 huruf (g) dan Pasal 51 ayat 1 huruf (g) UU No 8 Tahun 2012, telah mengembalikan hak-hak rakyat yakni hak seorang mantan narapidana untuk ikut berpartisipasi dalam politik dan hak yang sama di hadapan hukum. Artinya dalam pandangan Fiqih Siyasah hukum menjadi anggota legislatif adalah mubah, apabila ia telah bertaubat seperti yang telah disyaratkan oleh Pasal 12 Huruf (g) dan Pasal 51 ayat 1 huruf (g) UU No 8 Tahun 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hadirkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, dan mengajarkan manusia, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan kemampuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP MANTAN NARAPIDANA MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF (STUDY ANALISIS UU NO 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD)”** ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, Amiiinn.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini, maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun, jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan, maka itu datanganya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berpikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapakan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapakan keberhasilan serta kebahagiaan penulis, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda (Alm) Dalius dan Ibunda Dalimarni serta saudara dan Keluarga Besar penulis, seperti adik, abang, kakak, nenek, paman dan Keluarga Besar yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

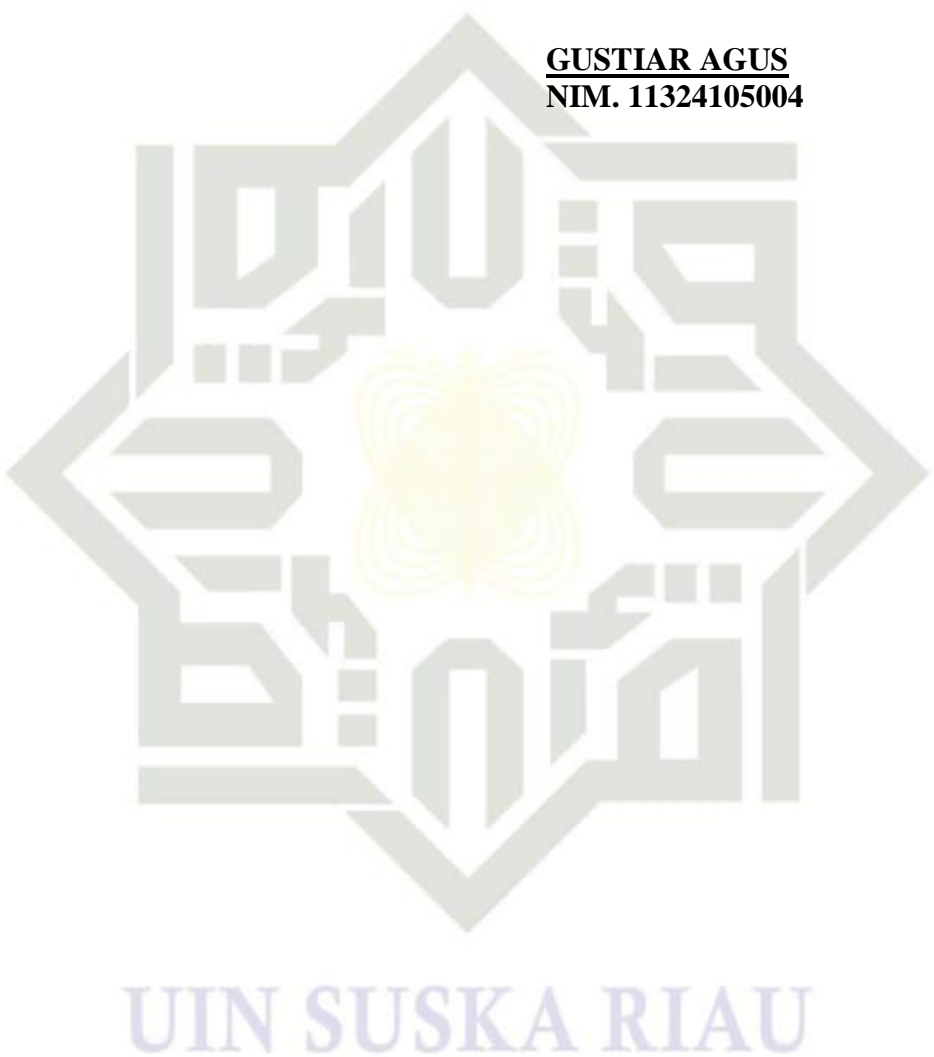
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. H. Hajar M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Ketua Jurusan dan Sekretaris Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN SUSKA RIAU, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Bambang Firdaus, SH,MH selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Bapak Rahman Alwi, MAG selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Dosen – dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau
9. Kepada Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terima kasih atas peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis, sehingga memudahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tidak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang berlipat ganda, Amiiinn.

Wabillahirtaufiq Walhidayah Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, September 2019
Penulis

GUSTIAR AGUS
NIM. 11324105004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Tinjauan Kepustakaan	10
E. Penjelasan Judul	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II ANGGOTA LEGISLATIF DI INDONESIA	17
A. Pengertian DPR	17
B. Tata Cara Pemilihan Anggota Legislatif	21
C. Tugas dan Wewenang Anggota Legislatif	27
D. Syarat-Syarat Anggota Legislatif	29
BAB III AHLUL HALLI WAL AQDI DALAM FIQH SIYASAH	36
A. Pengertian <i>Ahl al-Halli wal-aqdi</i>	36
B. Sejarah Perkembangan <i>Ahl al-Hall Wa al-Aqdi</i>	40
C. Syarat-Syarat <i>Ahl al-Hall Wa al-Aqdi</i>	42
D. Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional <i>Ahl al-Halli wa al- 'Aqdi</i>	45
E. Teknik Pemilihan <i>Ahl al Halli Wal Aqdi</i>	49
BAB IV NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF	55
A. Mantan Narapidana dalam Hukum Islam	55
B. Narapidana dalam Pasal 12 Huruf (g) dan Pasal 51 Ayat 1 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012	63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif Menurut Hukum Islam	70
D. Analisa Penulis	75
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Badan Legislatif yang semuanya mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing yang bertujuan melaksanakan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga tinggi negara yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi. Sedangkan MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggotanya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.² Selain itu, untuk menjadi pejabat dalam lembaga-lembaga di atas harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang telah disesuaikan dengan karakter jabatan masing-masing.

Dalam proses dan pemilihan pejabat publik dalam pemerintahan, dilakukan dengan cara Pemilihan Umum yang melibatkan seluruh rakyat sebagai pemilih. Pemilihan ini biasanya disebut Pemilihan Umum (PEMILU). Pemilu

¹Pasal 69 UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123)

² Pasal 2 UU Nomor 27 Tahun 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bagian proses rakyat yang memilih pemimpin Negara, selain memilih Kepala Negara sebagai Eksekutif juga memilih DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga Legislatif.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota DPD, ditentukan dalam Pasal 12, dan untuk DPR, DPRD dalam Pasal 51 Undang-Undang No 8 Tahun 2012. Yaitu:

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.³

Pasal di atas memuat syarat setiap orang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota Legislatif baik pusat maupun daerah. Pada huruf (g) menyebutkan bahwa seorang calon Legislatif harus memenuhi syarat "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima (5) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang atau resedivis.⁴

³ Pasal 12 dan Pasal 51 huruf g UU RI No. 8 Tahun 2012, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117)

⁴ Penjelasan Pasal 12 huruf (g) dan Pasal 51 ayat 1 Huruf (g) UU No 8 Tahun 2012, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat dipahami bahwa mantan narapidana dibolehkan menjadi anggota

Legislatif dengan beberapa syarat:

1. Mantan narapidana yang dipidana dengan ancaman dibawah lima (5) tahun.

Kesimpulan ini bisa ditarik dengan menggunakan metode *Interpretasi Argumentum a Contrario* yaitu merupakan metode konstruksi yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam Undang-undang. Ini merupakan cara penafsiran atau penjelasan Undang-Undang yang didasarkan pada pengertian sebaliknya dari kata konkrit yang diatur dalam Undang-Undang.⁵

Pengambilan kesimpulan ini dalam Ushul Fiqih dikenal dengan *Mafhum Mukhalafah* yaitu maksud makna yang difahami dari pada lafaz secara bersalahan atau makna yang tersirat bertentangan dengan makna dari pada lafaz yang tersurat.⁶

2. Mantan narapidana yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima (5) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih.

3. Yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana.

4. Bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Pada pasal 12 huruf (g) dan Pasal 51 huruf (g) ini, tentu menjadi hal yang istimewa bagi para mantan narapidana. Dengan adanya syarat tersebut maka

⁵ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 69

⁶ Ismail Mahmood, Mohammad Zaini Yahya & Mat Noor Mat Zain, *Usul Fiqh 1*, (Malaysia : Universiti Kebangsaan, 2003), hal. 202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peluang mantan narapidana untuk mengikuti perebutan kursi Dewan Perwakilan Rakyat terbuka lebar. Walaupun dibatasi dengan jenis pidana yang ancamannya di bawah lima tahun, tetapi dengan ketentuan ini, terkesan mempersilahkan para mantan narapidana untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan dalam penataan negara.

Secara politik, aturan Pasal 12 huruf (g) dan Pasal 51 ayat 1 huruf (g) UU NO 8 Tahun 2012) ini jelas akan menurunkan kapasitas dari lembaga Legislatif ini sendiri seperti fungsi pengawasan, pengundangan, penganggaran, perwakilan dan lain sebagainya. Karena persyaratan ini memberi peluang dan kesempatan kepada orang-orang yang telah cacat secara moral dan orang-orang yang sudah diklaim tidak lagi amanah, adil, jujur dan sebagainya untuk menjadi anggota Legislatif.

Untuk membangun lembaga Legislatif yang kredibel dan bisa dipercaya oleh rakyat, seharusnya para anggotanya memiliki integritas yang mumpuni (bermoral), cerdas (kompetensi), dan bersikap negarawan (mendahulukan kepentingan rakyat). Apalagi anggota Legislatif merupakan representasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Artinya Penerapan UU Nomor 8 Tahun 2012 belum dapat menjamin akan terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mampu melaksanakan kekuasaan, fungsi, dan hak yang diberikan UUD 1945.

Dalam konsep perpolitikan Islam, badan Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah ada, istilah yang paling populer dipakai yaitu *Ahl al-Halli wa al-aqdi*, dan kepala daerah juga dijumpai yaitu dengan sebutan *Amir*.⁷ Istilah *Ahl*

⁷ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, Terjemahan Faturrahman Abdul Hamid, (Amzah 2005), hal. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-halli wa al-aqdi mulai muncul dalam kitab-kitab para ahli tafsir dan ahli Ushul Fiqih setelah masa Rasulullah SAW mereka berada diantara orang-orang yang dinamakan dengan *As-shahabah*.⁸ Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih Khalifah, Imam, Kepala Negara secara langsung.⁹

Walaupun istilah *Ahl al-Hali wa al-Aqdi* belum muncul pada masa Rasulullah SAW, namun dalam prakteknya Rasul selalu melakukan musyawarah dengan beragam gambaran dan peristiwa yang semuanya mengukuhkan akan komitmen penguasa dalam Islam untuk bermusyawarah dengan dewan permusyawaratan. Dewan inilah yang disebut dengan *Ahl al-halli wa al-Aqdi* yang anggotanya terdiri dari para sahabat, mereka yang disertai tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat.¹⁰

Pada masa Khalifah Ar-Rasyidin tidak jauh berbeda dari masa Rasulullah, golongan *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* adalah para pemuka sahabat yang sering diajak bermusyawarah oleh khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali. Hanya pada masa Umar, Ia membentuk Team Formatur yang beranggotakan enam orang untuk memilih Khalifah sesudah ia wafat.¹¹ Ulama fiqih menyebutkan team formatur itulah sebagai *Ahl al-Halli wa al-Aqdi*.¹²

⁸ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam...*, hal. 78

⁹ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam...*, hal. 78

¹⁰ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam...*, hal. 78

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), hal. 65

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hal. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa Ahli Tafsir yang mengidentikkan *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* dengan Ulil Amri seperti Syaikh Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa Ulil Amri ialah para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu¹³. *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* yang mendapat kepercayaan umat yang ketetapanannya diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada Surat An- Nisa': Ayat 83 :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). ketakutan itu disampaikan kepada Rasul dan ulil Amri, tentulah Rasul dan ulil amri yang ahli dapat menetapkan kesimpulan (istimbat) dari berita itu.”

Al- Mawardi menentukan syarat-syarat mutlak yang harus dimiliki oleh *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* adalah adil, amanah, ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam, dan berwawasan serta sikap berakhsana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan, dan tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang belum diatur dalam Al-quran dan Hadist serta juga

¹³ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam...*, hal. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup pengawasan terhadap penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran.¹⁴

Fungsi dari lembaga *Ahl al-Halli wa al-Aqdi*:

1. Mengangkat dan memberhentikan Khalifah (Kepala Negara)
2. Sebagai pemerintah bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan,
3. Mengeluarkan Undang-Undang yang belum diatur dalam Alquran dan Hadist
4. Serta juga mencakup pengawasan terhadap penguasa (Imam) untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran.¹⁵

Dalam kontek Indonesia fungsi dan tugas *Ahl Halli Wa Aqdhi* seperti di atas, dipegang oleh MPR sedangkan anggota MPR adalah gabungan dari DPR dan DPD. Dalam Pasal 4 Undang-Undang NO 27 tahun 2009 dijelaskan bahwa MPR mempunyai fungsi dan wewenang: mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden, dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.

Setelah ditarik ke Pemerintahan Islam, ternyata praktek yang telah dilaksanakan oleh Indonesia sudah mengalami perkembangan. Jadi praktek yang selama ini berlaku di Indonesia hampir sama dengan pemerintahan Islam, akan tetapi Indonesia sudah mengalami perkembangan pemikiran dalam mengatur pemerintahannya. Hal itu akan menjadi pertanyaan besar, apakah perkembangan tersebut bertolak belakang dengan konsep Islam ataukah tidak?

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hal.139

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hal. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu sebab yang dapat menghilangkan keadilan seorang muslim adalah tindakan kriminal seperti korupsi, minum khamar, membunuh, memberi kesaksian palsu dan sebagainya.¹⁶ Jika seorang muslim terbukti melakukan tindakan kriminal seperti contoh di atas, kemudian mendapatkan sanksi *Had* maka ia dihukumi sebagai seorang fasik dan telah kehilangan sifat adil dari dirinya.¹⁷

Lalu bisakah seseorang yang dihukum fisik karena dikenai *Had* atau tertolak kesaksiannya karena sebab lain, memiliki sifat adil? Bolehkah ia mencalonkan atau dicalonkan menjadi pejabat Negara?

Dalam surat An-Nisa' Ayat 110 menyatakan:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٠﴾

Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, Kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Walaupun mantan narapidana banyak mendapat respon dan penolakan dari masyarakat, karena mantan narapidana adalah orang yang sudah cacat secara moral, tetapi dalam Al-qu'ran dan Hadist hampir tidak ditemui secara tegas mengatakan tentang syarat-syarat anggota Legislatif apalagi berstatus mantan narapidana, begitu juga dalam sejarah perpolitikan Islam.

Masalah di atas menjadi topik menarik jika perpolitikan Indonesia khususnya mengenai mantan narapidana menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan dibahas secara mendalam berdasarkan analisis fiqih siyasah. Untuk itu penulis memilih judul: Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Mantan

¹⁶ Ahmad Ad da'ur, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*, (Jakarta; Pustaka Thariqul Izzah, 1999), hal. 197

¹⁷ Ahmad Ad da'ur, *Hukum Pembuktian Dalam Islam...*, hal. 197

Narapidana Menjadi Anggota Legislatif (*Study Analisis UU NO 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR*)

B. Rumusan Masalah

Dari uraian Latar Belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang ingin penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Mengapa mantan narapidana dibolehkan menjadi calon anggota Legislatif dalam Pasal 12 huruf (g) dan Pasal 51 ayat 1 huruf (g) UU NO 8 Tahun 2012?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih siyasah terhadap Pasal 12 huruf (g) dan Pasal 51 ayat 1 huruf (g) UU NO 8 Tahun 2012 tentang mantan narapidana menjadi anggota Legislatif ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui alasan dibolehkannya pencalonan mantan narapidana menjadi anggota legislatif dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2012.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap dibolehkannya mantan narapidana sebagai anggota legislatif.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik kepentingan teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan serta memperkaya khazanah keilmuan hukum politik Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhubungan dengan syarat pencalonan mantan narapidana menjadi anggota Legislatif dalam hukum politik Islam.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk diterapkan dalam memenuhi syarat calon mantan narapidana sebagai calon anggota legislatif untuk kemudian dijadikan pedoman pertimbangan dalam pemilihan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Tinjauan Kepustakaan

Dalam kajian kepustakaan ini banyak pembahasan yang membahas tentang perpolitikan Islam, tetapi penulis belum menemukan pembahasan atau tulisan yang secara spesifik membahas tinjauan fiqh siyasah terhadap UU No 8 Tahun 2012 Pasal 12 dan Pasal 51 Tentang syarat mantan narapidana menjadi anggota Legislatif. Namun yang penulis temukan tentang Lembaga Legislatif yang hampir mirip dengan tulisan penulis adalah tulisan :

RIDWAN, 1311.006 Pelaksanaan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Bukittinggi.

Pembahasan di atas jelas sekali perbedaannya dengan penulisan yang akan penulis bahas, namun yang membedakannya yaitu saudara Ridwan membahas tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas pada pemilu Legislatif. Sementara pembahasan yang penulis bahas ini lebih fokus mengkaji tentang pandangan Fiqh Syasah terhadap syarat anggota legislatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjelasan Judul

Penelitian ini berjudul: Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif (*Study Analisis UU NO 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR*)

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, memeriksa dan memahami.¹⁸ Jadi tinjauan adalah pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) fiqih siyasah mengenai syarat mantan narapidana menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD. Adapun Fiqih Siyasah kata berasal dari akar kata *سياسة-ساس* yang artinya, mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Oleh karena itu berdasarkan pengertian harfiah kata Assiyasah berarti perintah pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan. Sedangkan fiqh mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Secara termiologis (istilah) fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amalan perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili.¹⁹ Dari segi etimologis dan terminologis Fikih Siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁰

UU No 8 Tahun 2012 adalah Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka 2002), hal. 288

¹⁹ Ahmad Dzajuli, *Fiqih Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariat*, (Jakarta: Kencana Media Grup 2003), hal. 26

²⁰ Ahmad Dzajuli, *Fiqih Siyasah...*, hal. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perwakilan Rakyat Daerah, yang terdapat dalam Pasal 12 Persyaratan bakal calon anggota DPD dan Pasal 51 Persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun DPR adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Narapidana adalah tahanan yang ditahan dalam lembaga pemasyarakatan.²¹ Jadi, narapidana adalah seseorang yang telah terbukti melakukan kesalahan yang melanggar hukum dan atas kesalahannya maka ia dikenakan sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun mantan narapidana adalah orang yang pada waktu lalu pernah menjalani hukuman pidana sebab telah melakukan kejahatan atau orang yang telah dibebaskan dari segala tuduhan dan berhak memperoleh kemerdekaan kembali.²²

Berdasarkan penjelasan judul di atas maka maksud dari keseluruhan judul ini adalah bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap orang yang pada waktu lalu pernah menjalani hukuman karena melakukan kejahatan dan telah dibebaskan dari segala tuduhan untuk menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD berdasarkan Pasal 12 dan 51 Undang-Undang NO 8 Tahun 2012.

²¹ Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika.2007), hal.102

²² Ahmad Dzajuli, *Fiqih Siyasah...*, hal.178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normative yang bersifat deskriptif. Artinya penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan sedetail mungkin tentang norma-norma yang berlaku dalam hukum Islam dan memandang kedudukan hukum terhadap mantan narapidana.

2. Sumber Data

Yang dimaksudkan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data itu diperoleh.²³ Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka segala kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema²⁴.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber primer yaitu: sumber yang berkaitan langsung dengan dengan peristiwa yang di ceritakan.

Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang pemilu legislatif.

- b. Sumber sekunder:

1. A.H. Djazuli, Fikih Siyasah; Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariat, Bandung, Kencana Media Grup, 2007.
2. Imam al-Mawardi. Al-Ahkam As-Sulthaniyah, diterjemahkan oleh Fadli Bahari, yang berjudul Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam, Jakarta, Darul Falah, 2006.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), hal.114

²⁴ Muhammad Nasir, *Metodologi Research*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007.
4. Sumber data sekunder lain: Buku teks, dan literatur lain yang membahas tentang persoalan ini. Literatur yang dimaksud tidak terbatas pada buku-buku, namun juga berasal dari internet serta statement dan pendapat dari pakar yang berkompeten dibidang ini.

1) Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka yaitu meneliti sumber-sumber pustaka yang ada kaitanya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode antara lain:

- a) Reading, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkenaan dengan tema penelitian.
- b) Writing, yaitu mencatat data yang berkenaan dengan penelitian.

2) Metode Analisis Data

Dalam mengelola data yang penulis peroleh, maka penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu teknik analisis dengan cara menganalisa terhadap berbagai sumber informasi termasuk bahan cetak (buku, artikel, Koran, majalah, dan sebagainya) dan bahan non cetak seperti gambar.²⁵

Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan teknik deskriptif analisis dalam arti menggambarkan dan menguraikan

²⁵ Prasetyo Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta : FISIP UI, 2006), hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 untuk disesuaikan relevansinya dengan konsep Fiqih Siyasah. Secara keseluruhan, mulai dari latar belakang, dasar hukum dan sebagainya yang disusun secara objektif dan sistematis, sehingga bisa digunakan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan kerangka berpikir deduktif yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum tentang teori-teori fiqh siyasah yang berhubungan dengan *siyasah dusturiyah* dan hak-hak umat, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus yang berkenaan dengan pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian dalam bentuk deskriptif yang menggambarkan alur logis dari bangunan bahasa skripsi mulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup.

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian kepustakaan, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Mengkaji tentang Anggota Legislatif di Indonesia. Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian Anggota Legislatif, tata cara pemilihan Anggota Legislatif, tugas dan wewenang Anggota Legislatif, syarat-syarat Anggota Legislatif.

BAB III Legislatif dalam Fiqh Siyasah. Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang, pengertian Ahlul Hilli Wal Aqdi, syarat-syarat Ahlul Hilli

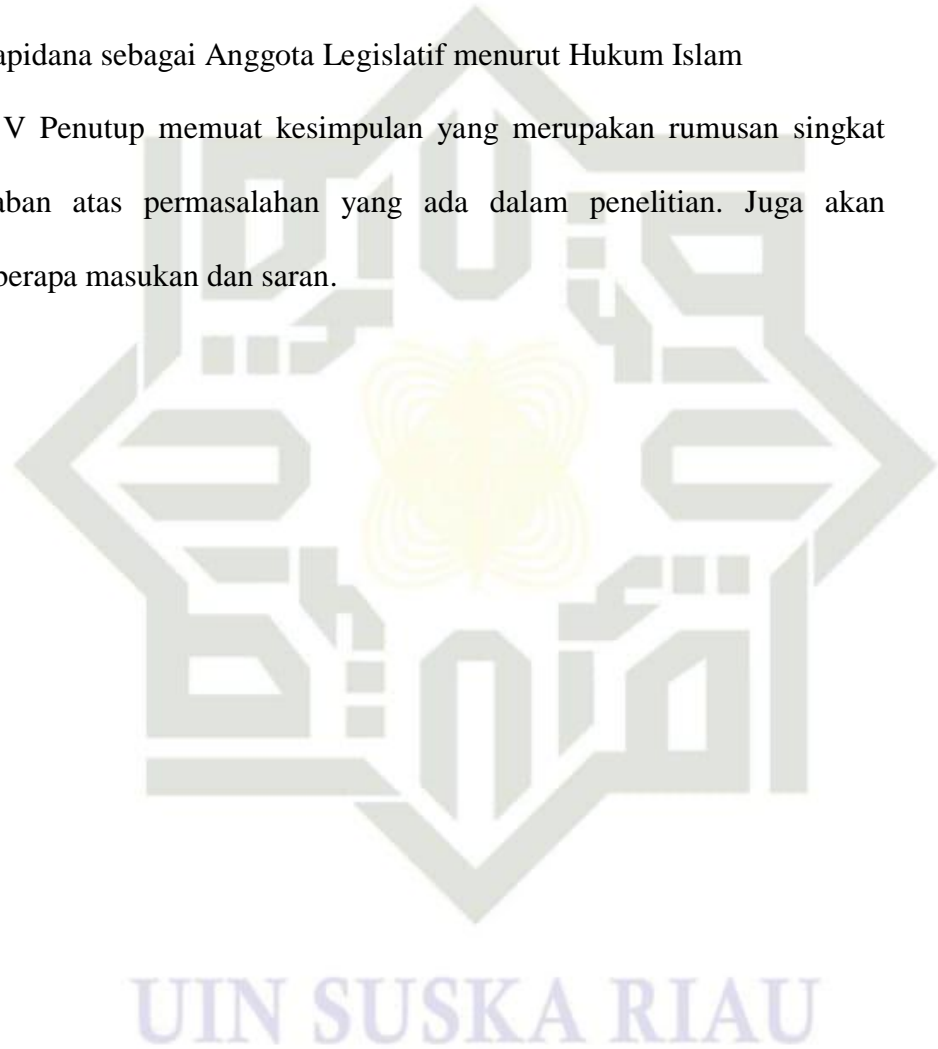
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wal Aqdi, tugas dan wewenang Ahlul Hilli Wal Aqdi, teknik pemilihan Ahlul Hilli Wal Aqdi

BAB IV Narapidan sebagai Anggota Legislatif. Bab ini menjelaskan tentang, Narapidana sebagai Anggota Legislatif, Narapidana dalam Undang-Undang, Narapidana sebagai Anggota Legislatif menurut Hukum Islam

BAB V Penutup memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian. Juga akan dituliskan beberapa masukan dan saran.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II ANGGOTA LEGISLATIF DI INDONESIA

A Pengertian DPR

Dewan perwakilan rakyat (DPR) adalah suatu lembaga tertinggi negara, yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil rakyat. Jumlah perwakilan pilihan rakyat yang di miliki oleh suatu negara menentukan sistem apa yang di anut oleh negara yang bersangkutan. Ada negara yang menganut sistem bikameral (mempunyai dua badan/kamar), misalnya Inggris (House of Lord dan House of Commons), Amerika Serikat (Senate dan House of Representative) dan Belanda (Eerste Kamer dan Tweede Kamer).²⁶

Indonesia mempunyai suatu perwakilan rakyat yang hanya terdiri dari satu badan saja, yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas dari pada DPR (juga disebut Parlemen), pada umumnya ialah, memelihara/menjaga, memajukan kepentingan rakyat, serta membantu/mengawasi pemerintah. Selain itu DPR membantu dan mengawasi pemerintah agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Menurut Undang- Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden memegang kekuasaan Legislatif. Kedudukan dewan ini kuat sehingga tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, dan sebaliknya Presiden tidak dapat di jatuhkan oleh DPR. Pasal 19 ayat (1) menetapkan bahwa susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-undang. Penafsiran Muhammad Yamin terhadap Pasal 19 ayat (1) tersebut adalah, bahwa susunan DPR tidak harus ditetapkan dengan Undang-undang Pemilihan, tetapi bisa ditetapkan dengan

²⁶ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1985), hal.255

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang biasa (umum). Bertolak dengan tafsir yang demikian dengan keanggotaan Dewan yang ditetapkan dengan Undang-Undang itu bisa saja disusun atas dasar Undang-Undang Pemilihan, bisa juga atas dasar pengangkatan/penunjukan asal saja sudah ditetapkan atau diatur dengan Undang-Undang, baik isinya melalui pemilihan ataupun melalui pengangkatan/penunjukan itu adalah sah pokoknya diatur oleh Undang-Undang.

Moh. Kusnardi, SH dan Bintan R Saragih, SH. berpendapat bahwa jika diperhatikan sebutan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maka badan itu seharusnya diisi dengan anggota-anggota yang dipilih sebab mereka itu adalah wakil rakyat. Tetapi harus diakui bahwa diantara rakyat Indonesia masih terdapat golongan yang tidak dapat melakukan pemilihan berhubung dengan kedudukannya, yaitu ABRI. Oleh karena itu wajar jika kepada mereka diberikan tempat sebagai wakil dalam badan perwakilan tanpa melalui pemilihan tetapi dengan cara pengangkatan/penunjukan.

Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang pengisian keanggotaan DPR ini (UU No 15/1967 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1985 serta Undang-Undang 16 Tahun 1969 yang terakhir diubah dengan Undang No 2 Tahun 1985) terlihat bahwa cara yang dipakai untuk mengisi anggota-anggota DPR dilakukan dengan pemilu serta dengan penunjukan/pengangkatan, sehingga susunan keanggotaannya merupakan gabungan antara anggota yang dipilih dan anggota yang diangkat. Jumlah keseluruhan anggota DPR itu adalah 500 orang dengan perincian: 400 orang diangkat melalui pemilihan dan 100 orang diangkat berdasarkan pengangkatan/penunjukan oleh



Presiden. Adapun anggota-anggota yang diangkat itu adalah dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata. Namun sejak tahun 1999 (setelah era reformasi) dari 500 orang anggota DPR hanya 38 orang yang diangkat. Dan sejak 2004 tidak akan ada lagi anggota DPR yang diangkat.²⁷

Sejarah singkat tentang DPR,

Komite Nasional Pusat.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, DPR belum sempat dibentuk menurut aturan yang ditetapkan UUD 1945. Dalam UUD 1945 disebutkan, bahwa sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional. Demikianlah pada tanggal 29 Agustus 1945 telah dibentuk Komite Nasional Pusat (KNP). Salah satu tugas KNP adalah membuat Undang-Undang. Pelaksanaan pekerjaan KNP sehari-hari dilakukan oleh Badan Pekerja KNP (BP-KNP). Pada masa permulaan hidup bernegara, BP-KNP inilah yang menjalankan tugas DPR.

DPR Pada Masa RIS 1949

Pada tanggal 27 Desember 1949 lahirlah Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam Negara Serikat, yakni RIS ini, kekuasaan tertinggi (kedaulatan) dalam negara dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat. Senat ialah Badan Perwakilan dari Negara-Negara bagian dalam lingkungan Negara Serikat RIS. Senat bersama-sama Pemerintah dan DPR yang berwenang menetapkan Undang-Undang RIS. DPR Negara RIS terdiri dari 150 orang anggota.

²⁷ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2001), hal. 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DPR Pada Masa UUDS 1950

Dalam perkembangannya, negara RIS ini tidak memuaskan bangsa Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1950 Negara RIS diganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi (UUD) RIS 1949 diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950). Dengan demikian Senat negara RIS dihapuskan dan yang masih tetap ada ialah DPR Sementara (DPRS). DPRS Negara Republik Indonesia terdiri dari:

- a. Seluruh Anggota DPR-RIS.
- b. Seluruh Anggota Senat-RIS.
- c. Seluruh Anggota BP-KNP (R. I.).
- d. Seluruh Anggota DPA (R.I.).

DPRS beranggota 236 orang. Pada tanggal 26 September 1955 diadakan pemilihan umum yang pertama untuk memilih anggota DPR. Dalam pemilihan umum tahun 1955 ini terpilih 272 orang anggota.

4 DPR Gotong-Royong (DPR-GR).

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Dekrit Presiden yang isi pokoknya antara lain:

- a. Menyatakan berlaku kembali UUD 1945.
- b. Menyatakan tak berlaku lagi UUDS 1950.
- c. Dalam waktu singkat akan dibentuk DPR Sementara.

Demikianlah pada 22 Juli 1959 DPR hasil pemilihan umum Tahun 1955 ditetapkan menjadi DPR Sementara, sambil menunggu DPR yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 yang berlaku kembali. Pada tanggal 24 Juni 1960 DPR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara diganti dengan DPR Gotong-Royong (DPR-GR) yang berjumlah 283 orang.

DPR Hasil Pemilihan Umum.

Pada tahun 1966 lahirlah Pemerintahan Orde Baru yang bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sehubungan dengan itulah maka telah dibentuk UU Np. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan umum 3 Juli 1971 telah berhasil memilih anggota DPR yang menggantikan anggota DPR-GR pada tanggal 28 Oktober 1971. Berturut-turut pada tahun 1977 dan tahun 1982 telah diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR (460 orang). Jumlah anggota DPR tersebut adalah separuh dari keseluruhan jumlah anggota MPR yang berjumlah 920 orang.

Kedudukan, susunan, tugas dan wewenang DPR hasil pemilihan untuk selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR, yakni UU No. 16 Tahun 1969 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 5 tahun 1975.²⁸

Susunan keanggotaan DPR dibentuk melalui :

- a. Pemilihan umum dan
- b. Pengangkatan (untuk golongan fungsional).

B. Tata Cara Pemilihan Anggota Legislatif

Dalam proses dan pemilihan pejabat publik dalam pemerintahan, dilakukan dengan cara Pemilihan Umum yang melibatkan seluruh rakyat sebagai pemilih. Pemilihan ini biasanya disebut Pemilihan Umum (PEMILU). Tetapi ada

²⁸ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia...*, hal.256-258

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kelompok fungsional dalam masyarakat yang dibutuhkan di lembaga perwakilan, maka dikenal cara pengangkatannya atau menunjuk oleh organisasi fungsionalnya. Sehubungan dengan itu maka cara untuk mengisi keanggotaan lembaga perwakilan kita kenal dua cara yaitu:

Melalui pemilihan organisasi

Dalam sistem ini rakyat dalam suatu negara dianggap sebagai individu-individu yang bergabung dalam persekutuan-persekutuan hidup (organisasi) baik itu berdasarkan lapisan sosial, profesi, keahlian maupun asal atau keturunan. persekutuan ini ialah sebagai pengendalian hak politik untuk menunjukkan wakilnya di lembaga perwakilan sesuai dengan jumlah yang di mintak oleh konstitusi atau Undang-undang yang mengatur Lembaga Perwakilan tersebut. Mungkin dalam persekutuan hidup (organisasi) tersebut ada pemilihan umum atau mungkin tidak, tetapi itu tidak menjadi soal karena yang di pentingkan adalah organisasi tersebut mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan (ditentukan).²⁹

Dari konstitusi jelas kelihatan kedudukan lembaga perwakilan agak lemah, sehingga biasanya apabila lembaga perwakilan itu hendak menetapkan Undang-undang yang menyangkut hak-hak rakyat, Undang-Undang tersebut baru berlaku kalau disetujui oleh rakyat melalui referendum.

Sistem pemilihan mekasis.

Dalam sistem ini rakyat dianggap sebagai individu-individu yang berdiri sendiri, rakyat inilah (yang memenuhi syarat) sebagai pengendali hak pilih,

²⁹ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana setiap satu orang mempunyai satu suara. Sistem ini biasanya dilaksanakan dengan dua sistem yaitu sistem pemilihan umum yang proporsional dan sistem pemilihan umum yang Distrik.

a. Sistem Distrik

Sistem ini juga sistem mayoritas atau *single-member constituency*. Dalam sistem ini wilayah negara yang menyelenggarakan sistem ini dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen untuk memperebutkan dalam suatu pemilihan umum. Wakil yang terpilih hanya satu orang (itulah sebabnya disebut juga *sistem single-member constituency*) yaitu calon yang memperoleh suara terbanyak (mayoritas) dalam pemilihan distrik bersangkutan (karena itu pula sistem ini disebut sistem mayoritas-mayoritas). Misalnya ada 5 orang calon dalam satu pemilihan disuatu distrik yang mempunyai penduduk (pemilih) 120 orang, si A memperoleh 21 suara, si B 20 suara, si C 20 suara, si D 20 suara, dan si E 19 suara. Maka yang terpilih jadi wakil adalah si A walaupun selisih tidak banyak dengan calon lainnya dan hanya memperoleh 21% dari keseluruhnya yang ada. Karena itu pula kelemahan dari sistem ini adalah banyaknya suara yang terbuang, partai-partai kecil susah memenangkan calonnya dalam pemilu tersebut.

Tapi sistem ini dapat diperebutkan dengan sistem 2 partai, sehingga calon yang muncul dalam pemilihan umum di distrik tersebut hanya 2 orang, dan yang menang biasanya memperoleh suara lebih dari separuh. Kebaikan dari sistem ini adalah lebih cepat, organisasinya tidak perlu besar biaya agak murah dan hubungan antara pemilih dan siterpilih dekat karena pemilih biasanya mengenal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

calon-calonnya, atau dengan kata lain partai-partai politik tidak akan berani mencalonkan orang-orang yang tidak populer di distrik bersangkutan.

2. Sistem Pemilihan Proporsional.

Sistem ini disebut juga sistem Perwakilan berimbang atau multi-member constituency. Dalam sistem ini kursi yang ada di parlemen pusat untuk diperebutkan dalam suatu pemilihan umum, dibagikan pada partai-partai/organisasi peserta pemilihan umum tersebut sesuai dengan imbang suara yang diperoleh partai/organisasi tersebut dalam pemilihan umum tersebut (karena itu pula sistem ini disebut sistem suara berimbang). Kalau wilayah negara tersebut agak luas seperti Indonesia misalnya wilayah dibagian atas daerah-daerah pemilihan, dan kursi yang diperebutkan di parlemen pusat dibagikan kepada daerah-daerah pemilihan, sesuai dengan komposisi atau jumlah penduduk yang ada di daerah pemilihan tersebut misalnya dengan menentukan tiap wakil harus didukung oleh 400.000 penduduk yang mempunyai penduduk 4.000.000 di jatuhkan 10 kursi untuk diperebutkan oleh partai-partai organisasi peserta pemilihan umum di daerah pemilihan tersebut. Partai-partai/organisasi peserta pemilihan umum tersebut memperoleh kursi sesuai dengan imbang suara yang diperolehnya dalam pemilihan umum tersebut. Jadi jenis kursi yang diperebutkan tidak hanya satu sehingga wakil yang terpilih sebanyak kursi yang disediakan di daerah pemilihan umum tersebut. Karena itu sistem ini disebut juga *Multi Member Constituency*. Kebaikan dari sistem ini ialah bahwa partai-partai kecil kemungkinan besar memperoleh wakil, karena pemenang pemilihan (di daerah) tersebut bukan sedikit. Kelemahan sistem ini biasanya adalah mahal dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerlukan organisasi yang besar. Kemudian calon-calon terpilih jarang dikenal oleh pemilih karena menentukan calon disuatu daerah pemilihan adalah Pemimpin Pusat dari partai-partai/organisasi peserta pemilihan umum itu. Dan yang ditawarkan dalam pemilihan umum ini adalah program partai/organisasi bukan program calon. Sistem ini sering dikombinasikan dengan stelsel daftar. Dimana dalam daftar calon dari suatu partai /organisasi urutan-urutan calon peserta dicantumkan. Dan apabila suara yang dibutuhkan mencapai jumlah untuk 1 wakil maka calon terpilih adalah calon nomor 1, dan kalau cukup untuk 2 wakil maka calon terpilih berikutnya adalah calon nomor 2 dan seterusnya.

Pemilu merupakan bagian proses rakyat yang memilih pemimpin negara, selain memilih kepala negara sebagai Eksekutif juga memilih DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Pemilu untuk memilih anggota DPR, pesertanya adalah partai politik. Partai politik dalam hal ini diyakini sebagai saluran utama untuk memperjuangkan kehendak masyarakat, bangsa dan negara, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional dan penyelenggara negara. Karena melalui partai politik inilah proses rekrutmen calon pemimpin negara dan wakil-wakil rakyat dilakukan. Baik dan buruknya pemimpin negara dan wakil rakyat kita sangat bergantung pada pola rekrutmen yang dilakukan partai politik. Rakyat atau pemilih hanya dapat memilih calon yang disodorkan oleh partai politik.

Pemilu di Indonesia terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Tujuan diselenggarakannya pemilu legislatif adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah. Sedangkan pemilu presiden dan wakil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

presiden untuk memilih presiden dan wakil presiden. Jadi sangat penting artinya bagi suatu bangsa dalam rangka membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat.³⁰

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilu merupakan hak setiap warga Kabupaten/Kota yang telah genap berumur 17 tahun pada saat hari pemungutan suara, atau sudah / pernah kawin mempunyai hak memilih dan harus terdaftar sebagai pemilih. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan dilaksanakan dengan sistim proposional terbuka. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistim distrik berwakil banyak.

Adapun tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi :

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
2. Pendaftaran peserta pemilu
3. Penetapan peserta pemilu
4. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
5. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota
6. Masa kampanye
7. Masa tenang
8. Pemungutan dan penghitungan suara
9. Penetapan hasil pemilu

³⁰ Legowo dan Sebastian Salang, *Panduan Menjadi Calon Anggota DPR /DPD /DPRD Menghadapi Pemilu*, (Jakarta: Pranita Offset, 2008), hal. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Pengucapan sumpah / janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.

Tugas dan Wewenang Anggota Legislatif

Tugas dan wewenang DPR adalah :

1. Bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-Undang.
2. Bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Melakukan pengawasan atas :
 - a. Melaksanakan Undang-Undang
 - b. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pengelolaan Keuangan Negara
 - c. Kebijakan pemerintah.

Sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

4. Membahas untuk meratifikasi (mensahkan) dan/memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden.
5. Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban Keuangan Negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.
6. Melaksanakan hal-hal yang di tugaskan oleh Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada DPR.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR dapat mengadakan konsultasi (minta nasihat) dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya³¹.

Fungsi DPR adalah:

- a) Bersama Presiden /Pemerintah membentuk Undang-undang.
- b) Bersama Presiden /Pemerintah membentuk Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Kedudukan DPR lebih kuat dari Pemerintah, sebab apabila DPR menolak RUU APBN yang diajukan pemerintah maka pemerintah melaksanakan APBN tahun sebelumnya.
- c) Mengawasi pemerintah, untuk melaksanakan tugas pengawasan ini DPR mempunyai hak yaitu :
 - d) Hak bertanya
 - e) Hak meminta keterangan
 - f) Hak angket (penyelidikan)
 - g) Hak usul pernyataan pendapat
 - h) Hak amandemen
 - i) Hak memilih seseorang apabila diminta oleh peraturan perundang-undangan
 - j) Hak usul inisiatif
 - k) Sebagai forum komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, baik melalui rapat-rapat kerja dengan pemerintah, dengar pendapat dengan

³¹ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia...*, hal.259-260

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pejabat-pejabat pemerintah maupun melalui dengar pendapat umum atau masyarakat. Termasuk fungsi ini adalah fungsi pendidikan politik.³²

D. Syarat-Syarat Anggota Legislatif

Setidaknya ada beberapa hal penting yang harus dipenuhi oleh seseorang bila ingin menjadi calon DPR atau DPRD.

Harus menjadi anggota partai tertentu, dan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh partai politik. Kemampuan, loyalitas pada partai serta derajat pelibatan dipartai sangat menentukan seseorang dicalonkan atau tidak oleh partai politik. Dalam konteks pemilu sekarang, penilaian tersebut sangat menentukan bagi partai untuk menetapkan nomor urut seseorang calon. Jadi, partai politik sangat menentukan untuk menenpatkan seseorang dalam nomor urut tertentu. Nomor urut yang ditetapkan bagi setiap calon sangat ditentukan oleh sejauh mana kualitas, perjuangan serta loyalitas seseorang terhadap partainya. Bila loyal dan bekerja keras bagi partai politik, peluang untuk mendapat nomor urut yang paling mudah cukup besar. Demikian sebaliknya.

Setiap orang yang akan menjadi wakil rakyat di DPR maupun DPRD, adalah orang yang cakap menurut Undang-Undang. Artinya memiliki kemampuan dan integritas dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan konstituen. Karena itu, Undang-Undang pemilu no. 10 tahun 2008 menetapkan berbagai persyaratan bagi seseorang bila ingin menjadi calon anggota DPR atau DPRD.

³² Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara...*, hal. 153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya seseorang dapat disahkan oleh KPU atau KPUD menjadi calon anggota DPR atau DPRD bila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang.

3. Seseorang dapat ditetapkan menjadi anggota DPR atau DPRD apabila dapat memenuhi perolehan suara sesuai yang diisyaratkan oleh Undang-Undang pemilu. Artinya, walaupun kedua syarat yang telah diuraikan sebelumnya telah terpenuhi, tetapi bila tidak mampu menarik simpati dan dukungan konstituen disuatu daerah pemilihan tertentu, maka seorang calonpun tidak bisa menjadi anggota DPR atau DPRD.

Dengan demikian, tidak mudah bagi seseorang untuk ditetapkan menjadi calon anggota DPR atau DPRD. Apalagi untuk meraih kursi di DPR atau DPRD, seseorang harus bekerja keras. Berbakti kepada partai politik dan juga berbakti kepada rakyat. Karena pada akhirnya, rakyat/konstituen yang akan menentukan.³³

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota DPR, DPRD dalam Pasal 12 dan pasal 51 Undang-Undang No 8 Tahun 2012. Yaitu :

1. Persyaratan Calon Anggota DPD (Pasal 12 Huruf (g))

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.³⁴

Perseorangan yang dimaksud dapat menjadi Peserta Pemilu harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih

³³ Legowo dan Sebastian Salang, *Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DPD/PRD Menghadapi Pemilu...*, hal. 47

³⁴ Pasal 11 UU RI No. 8 Tahun 2012 Tentang PEMILU Anggota DPR, DPD, dan DPRD, (Jemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan perundang-undangan;

- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. Mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. Mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p. Mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah pemilihan yang bersangkutan.³⁵

2. Persyaratan Calon Anggota DPR dan DPRD Pasal 51 Ayat 1 Huruf (g)

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia
- e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat

³⁵Pasal 12 UU RI No. 8 Tahun 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- h. Sehat jasmani dan rohani
- i. Terdaftar sebagai pemilih
- j. Bersedia bekerja penuh waktu
- k. Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

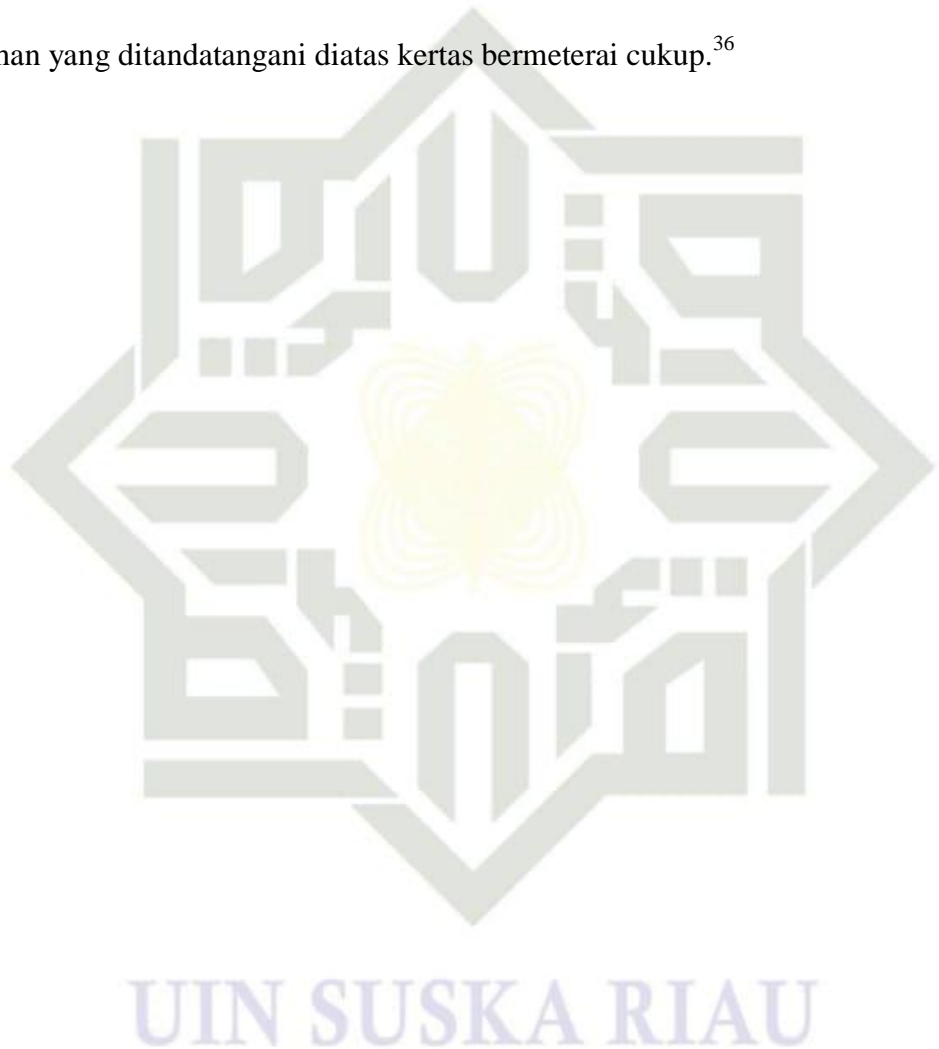
3. Kelengkapan administrasi calon anggota DPR/DPRD yang terdiri dari:

- a) KTP Warga Negara Indonesia.
- b) Bukti kelulusan seperti. Fotokopi ijazah, STTB, sertifikat, atau surat keterangan lain yang legislatif satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
- c) Surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.
- d) Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani.
- e) Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih.
- f) Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh waktu yang ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup.
- g) Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, PPAT, tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD kabupaten kota/kota yang ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup.
- h) Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai PNS, TNI, Polri, pengurus BUMN/BUMD dan pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
- j) Surat pernyataan kediaan hanya dicalonkan oleh 1 partai politik untuk 1 lembaga perwakilan yang ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup.
- k) Surat pernyataan tentang kesediaan hanya docalonkan oleh 1 daerah pemilihan yang ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup.³⁶



³⁶ Yudha pandu, *Pemilu DPR, DPD dan DPRD*, (Jakarta: Karya Gemilang , 2008), hal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

AHLUL HALLI WAL AQDI DALAM FIQH SIYASAH

A. Pengertian *Ahl al-Halli wal-aqdi*

Pengertian secara bahasa, *Ahl al-Halli wal-‘Aqdi* berarti orang yang mempunyai kewenangan untuk mengikat. Sedangkan, secara istilah *Ahl al-Halli wal-‘Aqdi* terdiri dari 3 kata, yaitu: *Ahl*, berarti orang yang berhak atau memiliki. *Al-Halli*, berarti melepaskan, memutuskan, dan memecahkan. *Wal-Aqd*, berarti mengikat, membentuk, dan transaksi.

Adapun pendapat para ulama Fiqh Siyasah mengartikan *Ahl al-Halli wal-‘Aqdi* adalah sebagai seorang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu masalah atas nama seluruh umat (masyarakat).³⁷ Dengan kata lain, *Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi* merupakan lembaga perwakilan yang bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Al - Mawardi menyebutkan *Ahl al-Hall wa al-aqd* dengan *ahlu ikhtiar* karena mereka yang berhak memilih Khalifah yang harus memenuhi tiga Syarat *pertama* keadilan yang memenuhi persyaratannya, *kedua*, memiliki ilmu pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi Imam, *ketiga* memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan ia mampu memilih *Imam* yang paling maslahat dan mampu sera paling tahu tentang kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat.³⁸

Abu A’la al – Maududi menyebutkan *Ahl al-Halli Wa al-’Aqdi* sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa, juga menyebut sebagai Lembaga

³⁷ Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Terjemahan, Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamiludin Nurdin, hal. 15-18

³⁸ Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam...*, hal. 255-256



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Legislatif.³⁹ Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkannya dengan *Ahl al-Syawkah*. Sebagian lagi menyebutkan dengan *Ahl al-Syura* atau *Ahl al-Ijma'*. Namun semuanya mengacu kepada pengertian “sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.”⁴⁰

Adapun penjelasan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak terdapat istilah *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi*. Istilah tersebut hanya terdapat dalam kitab-kitab Fiqih Siyasah, sebab para ulama Fiqh Siyasah, meliputi Imam Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, Al-Baghdadi, dan Al-Maududi, melihat *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* mempunyai kesamaan dengan makna *Ulil Amri* yang terdapat di surat An-Nisa' Ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. AN-Nisa': 59).⁴¹

Ulil Amri adalah “ahli al-Quran” yakni ulama, menurut Ibnu Kisan adalah ahli akal dan ahli Ilmu.⁴² Baidhawi dalam tafsirnya menerangkan bahwa *Ulil*

³⁹ Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, Terjemahan, Asep Hikmat, (Bandung, Mizan, 1990), hal. 245

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), hal. 139

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2000), hal.128

⁴² Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta; Kencana, 2006), hal. 284



Amri itu adalah Amir (komandan) dari pasukan di zaman Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat maka Ulil Amri itu pindah kepada para Khalifah, Kadi, dan kepala pasukan perang.⁴³

Menurut Ustazd al-Imam mula-mula yang menyamakan Ulil Amri dengan Ahlu Halli wa al-Aqdi adalah pengarang Tafsir Al-Nisaburi, keringkasan dari keterangan Al-Razi dalam tafsirnya.⁴⁴ Ahlu Halli wa al-Aqdi yang memusyawarahkan sesuatu dan diwajibkan umat mentaatinya ialah keputusan mereka yang berdasarkan musyawarah, sebagai perintah Allah dan keputusan isu hendaklah berlandaskan kepada ketentuan yang telah digariskan Allah SWT.⁴⁵ Menurut At-Thabari yang dikutip oleh Al-Qurthubi, Ulil Amri (Pemerintah) adalah ahli Al-Quran dan ilmu yang merupakan Malik yang dipilih oleh *rhimallah* yaitu Ahli Fiqih dan ulama dalam perihal agama.⁴⁶ Makna Ulil Amri juga terdapat dalam surat An-Nisa' Ayat 83, yang berbunyi:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya dan kalau mereka menyerahkannya pada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahui dari mereka (Rasul dan ulil amri), kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja (diantara kamu).” (QS. An-Nisa’: 83).

⁴³ Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam...*, hal. 284

⁴⁴ Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam...*, hal. 285

⁴⁵ Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam...*, hal. 285

⁴⁶ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi, Al Jami’ li Ahkam Al Quran*, Terjemahan, Ahmad Rjaji Kadir, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2008), hal. 619



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, terdapat juga beberapa pakar muslim yang melihat kesamaan

Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi dengan makna Ulil Amri, diantaranya adalah:

Muhammad Abduh, mengatakan Ulil Amri sebagai golongan *Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi* yang berasal dari kaum muslim. Mereka (*Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi*) terdiri dari Amir (pemimpin), Ulama, Hakim, maupun Panglima Perang yang menjadi rujukan umat muslim dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan umat.

Muhammad Rasyid Ridha, yang menyatakan Ulil Amri sebagai sekumpulan anggota *Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi* dari kaum Muslimin. Mereka (*Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi*) itu terdiri dari ulama, politikus, negarawan, panglima perang, maupun penguasa yang menjadi tumpuan umat untuk mengadakan persoalan.⁴⁷

Dari pengertian yang telah dikemukakan oleh Ulama Fiqh Siyasah serta pakar Muslim di atas, dapat diketahui *Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi* ialah representasi dari berbagai kelompok yang mempunyai profesi dan keahlian beragam. Dengan kata lain, anggota *Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi* adalah tokoh masyarakat yang telah diakui kemampuan dan keilmuannya, sehingga mendapat kepercayaan dari rakyat untuk mewakilinya.

Hubungan *Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi* sebagai wakil rakyat, dapat dilihat dalam pengertian yang diberikan Dr. Abdul Karim Zaidan dalam mendefinisikan *Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi* sebagai “orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang sudah memberikannya kepercayaan dan rakyat menyetujui pendapat

⁴⁷ Hamdullah, dkk, *Politik Islam Konsepsi dan Dokumentasi*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal.147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para wakil-wakilnya dengan ikhlas karena dilandasi oleh sikap konsekuen, taqwa, adil, serta kegigihan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat”.

Dengan didasarkan pada pengertian *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* di atas, maka rakyat wajib untuk taat terhadap keputusan yang telah ditetapkan Ahl al- Halli wa al-'Aqdi, selama hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan Allah (Al- Qur'an) dan Sunnah Rasul. *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* memiliki kewenangan membuat aturan yang sifatnya mengikat seluruh umat terkait dengan persoalan yang tidak diatur secara rinci oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist. Kewenangan *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* tersebut berfungsi untuk mengarahkan manusia pada kemaslahatan.⁴⁸

Namun, kewenangan *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* hanya membuat peraturan sipil, yang meliputi bidang: pemerintahan, politik, peradilan, ekonomi, pendidikan, militer, dan sebagainya.⁴⁹

B. Sejarah Perkembangan *Ahl al-Hall Wa al-Aqdi*

Walaupun istilah *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* belum muncul pada masa Rasul, namun dalam praktiknya Rasul selalu melakukan musyawarah dengan beragam gambaran dan peristiwa yang semuanya mengukuhkan akan komitmen penguasa dalam Islam untuk bermusyawarah dengan Dewan Permusyawaratan. Dewan inilah yang disebut dengan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* yang anggotanya terdiri dari para sahabat. Merekalah yang disertai tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat⁵⁰.

⁴⁸ H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariat*, (Jakarta: Kencana Media Grup 2003), hal. 76

⁴⁹ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, Terjemahan Faturrahman A.Hamid, (Jakarta: amzah, 2005), hal.85

⁵⁰ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam...*, hal. 78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa Khulafa' ar-Rasyidin tidak jauh berbeda dari masa Nabi, golongan *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* adalah para pemuka sahabat yang sering diajak bermusyawarah oleh Khalifah-Khalifah Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Hanya pada masa Umar, ia membentuk "Team Formatur" yang beranggotakan enam orang untuk memilih Khalifah sesudah ia wafat.⁵¹ Ulama' Fiqih menyebut anggota formatur tersebut sebagai *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi*. Dari sinilah terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama' dalam menentukan jumlah anggota *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi*.

Dalam sejarah Islam, pembentukan lembaga *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umaiyah di Spanyol, Khalifah al-Hakam II (961-976 M) membentuk Majelis Syura yang beranggotakan pembesar-pembesar Negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu Khalifah melaksanakan Pemerintahan Negara.⁵²

Pada masa Bani Abbasiyah tugas-tugas *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* dipegang oleh *Wazir*, ia diberi kewenangan mengangkat dan memberhentikan pegawai pemerintah, kepala negara dan hakim.⁵³ Al-Mawardi, ahli tata negara pada masa itu memandang *Wazir* kepada *Wazir Tafwidh*, yaitu *Wazir* yang memiliki kekuasaan luas memutuskan kebijaksanaan kenegaraan.

Pada masa Turki Usmani, awal kekuasaan Sultan Salim III ketika Usmani memasuki fase reformasi tradisional, dibentuklah lembaga permusyawaratan baru (*mesrevet*) yang beranggotakan pejabat-pejabat penting negara. Dalam lembaga

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hal. 65

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hal. 65

⁵³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hal. 89



ini mereka bertugas membicarakan masalah-masalah yang terjadi di Usmani dan mencari jalan keluarnya.⁵⁴ Jadi, dimasa ini tugas-tugas *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi* dijalankan oleh dewan permusyawaratan yang dibentuk oleh Sultan Salim.

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik Barat terhadap Islam, pemikiran tentang *Ahl al-Hall Wa al-Aqdi* juga berkembang. Para Ulama Fiqih Siyasah mengemukakan pentingnya pembentukan lembaga Perwakilan Rakyat atau DPR/MPR sebagai representasi dari kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang *Ahl al-Hall Wa al-Aqdi* ini dengan mengombinasikanya dengan pemikiran-pemikiran yang berkembang di Barat.⁵⁵

C. Syarat-Syarat *Ahl al-Hall Wa al-Aqdi*

Secara global bisa dikatakan bahwa *Ahl al-Hall wa al-Aqdi* adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas semua kemaslahatan rakyat seluruhnya, mereka adalah orang-orang yang mewakili kekuasaan rakyat. Mereka juga orang-orang yang telah dipercayai oleh rakyat dalam memperjuangkan aspirasi dan kemaslahatan rakyat yang denganya akan makmur kehidupan mereka. Rakyat juga akan selalu mengikuti apa yang mereka tetapkan baik dalam urusan agama maupun perkara dunia. Oleh karena itu, diantara tuntunan reformasi Islam bahwa *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* dalam Islam itu harus terdiri dari beberapa pakar dibidang ilmu perundang-undangan dan mengenal kemaslahatan-maslahatan rakyat, baik politik, sosiasal, peradilan, administrasi, dan finansial. *Ahl al-Halli wa al-Aqdi*

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hal. 99

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hal. 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus terdiri dari orang-orang yang bersifat adil, mempunyai pemikiran dan kebijaksanaan.⁵⁶

Mengingat banyaknya persoalan yang terjadi dalam pemerintahan, maka *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* harus dapat menganalisa persoalan tersebut secara cermat supaya keputusan yang diambil tidak merugikan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka anggota *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* diwajibkan untuk dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Ulama Fiqh Siyashah. Persyaratan itu meliputi:

- a. Adil, mempunyai arti untuk tidak berat sebelah dalam memutuskan masalah, khususnya yang berkaitan dengan pengangkatan pemimpin.
- b. Amanah, artinya benar-benar dapat dipercaya dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan oleh rakyat dengan baik.
- c. Berilmu, artinya memiliki ilmu pengetahuan, yang meliputi: ilmu keagamaan dan ilmu sosial sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan yang ada.
- d. Tidak zalim, artinya memiliki sifat kepemimpinan yang baik, sehingga dalam membuat peraturan sipil tidak melanggar ketentuan Allah yang terdapat pada Al-Qur'an dan Al-Hadist.
- e. Memiliki fisik yang baik, artinya sehat jasmani (panca indera) dan rohani.⁵⁷

Orang yang dinobatkan sebagai perwakilan adalah orang yang sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Fuqaha, yang mereka memiliki kelebihan

⁵⁶ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam* ..., hal. 112

⁵⁷ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*..., hal. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan keterjagaan dan keamanan dalam kepandaian serta ikhlas dalam menegakkan agama Allah.⁵⁸

Menurut Al-Mawardi syarat-syarat Dewan Pemilih (*Ahlu Halli wa al-Aqdi*) yang legal yang harus mereka miliki ada tiga:

- a. Adil dengan segala syarat-syaratnya
- b. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi Imam sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.
- c. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi Imam dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.⁵⁹

Diantara hak yang jelas dalam syarat *Ahlu al-Hall wa al-Aqdi* adalah sebagai berikut:

- a. Membaiat (menobatkan) orang yang menurut mereka mampu untuk memegang tongkat kepemimpinan.
- b. Melakukan ijtihad dalam hukum-hukum untuk mencapai kesepakatan (*ijma'*).
- c. Adil⁶⁰

Spesialisasi mempunyai pemikiran dan kebijaksanaan adalah sangat utama sekali, sedangkan spesialisasi mempunyai pengetahuan tentang Perundang-undangan dan cukup mengenal kemaslahatan umat itu memasukan mereka kepada kelompok mujtahid. Artinya kedudukan *Ahl al-Hall wa al-Aqd* bisa dipandang sebagai tugas Perundang-Undangan yang menuntut adanya pengenalan

⁵⁸ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam...*, hal. 112

⁵⁹ Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam...*, hal.113

⁶⁰ Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam...*, hal.113



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap hukum-hukum fatwa dan pengambilan hukum dalam masalah-masalah umum.⁶¹

Adil adalah akhlak yang paling utama, jika seseorang tidak bersifat demikian maka tidak sah kekuasaannya dan tidak boleh diterima kesaksiannya.⁶² Syarat ini sama dengan apa yang disyariatkan oleh Undang-Undang moderen pada orang-orang yang terpilih menjadi anggota dewan legeslatif dan akan hilang keanggotaanya bila tidak ada syarat tersebut.

D. Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*

a. Kedudukan *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*

Kedudukan *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* dalam pemerintahan sangatlah penting. Sebab, *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* merupakan perwakilan rakyat yang bertugas untuk mengangkat Khalifah dan mengarahkan kehidupan manusia kepada kemaslahatan dengan didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Para ahli Fiqh Siyasah berpendapat pembentukan lembaga *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* sangatlah penting. Hal tersebut dikarenakan oleh:⁶³

Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin untuk dimintai pendapat mengenai masalah kenegaraan dan dilibatkan dalam pembuatan undangundang.

Rakyat secara individu tidak mungkin untuk dikumpulkan dalam satu tempat untuk bermusyawarah.

Musyawarah hanya mungkin dilakukan jika pesertanya terbatas.

⁶¹ Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam...*, hal.113

⁶² Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam...*, hal, 113

⁶³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hal. 142-143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Penegakan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* hanya dapat dilakukan jika ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan umat antara pemerintah dengan rakyat. Kewajiban rakyat untuk taat kepada ulil amri (pemimpin) baru mengikat, jika pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah.

5 Ajaran Islam menekankan perlunya lembaga musyawarah, sebagaimana yang terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada mereka”. (QS. Ali-Imran: 159).

Hal di atas menunjukkan betapa pentingnya *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* dalam pemerintahan. Sehingga, ketetapan yang dikeluarkan oleh *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* harus dilaksanakan secara efektif oleh Lembaga Eksekutif dan dipertahankan oleh Lembaga Yudikatif atau Peradilan.⁶⁴ Untuk itulah, maka rakyat berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang telah diputuskan oleh *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* sesuai hasil musyawarah yang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Cara yang digunakan oleh *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* dalam pengambilan keputusan adalah musyawarah.

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hal. 162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewenangan Konstitusional *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*

Ahl al-Halli wa al-'Aqdi sebagai lembaga Pemerintahan, memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyat guna mewujudkan kemaslahatan. Kekuasaan *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* ini meliputi tugas, fungsi, dan wewenang:

Tugas *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* meliputi:

- a) Mencalonkan dan memilih kepala negara.
- b) Merumuskan mekanisme pemilihan kepala negara.
- c) Menyumpah (*bai'at*) kepala negara yang terpilih dalam proses
- d) Pemilihan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan yang ada.

2) Fungsi *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* adalah:

Mengawasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan negara, agar tidak terjadi penyimpangan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang ada atau kebijakan negara yang telah diputuskan.

Wewenang *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* meliputi:

- a) Memberi saran dan nasehat kepada khalifah dalam menentukan kebijakan pemerintahan, terkait dengan:
 - (1) Masalah-masalah yang sifatnya umum, seperti pemerintahan, ekonomi pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
 - (2) Masalah-masalah yang bersifat khusus, seperti militer atau hubungan internasional.
- b) Kewenangan di bidang Perundang-Undangan, meliputi:
 - (1) Menegakkan peraturan yang secara tegas terdapat dalam syari'at.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Merumuskan peraturan yang tidak diatur dengan tegas oleh Al- Qur'an dan Al-Hadist, khususnya yang berkaitan dengan masalah sosial (sipil).
- (3) Membatasi jumlah kandidat yang hendak menjadi Khalifah. Sehingga, kandidat diluar persetujuan *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* tidak dapat diterima.
- (4) Mengarahkan kehidupan manusia kepada kemaslahatan.

Sedangkan, substansi yang harus terkandung dalam Undang-Undang yang dibuat oleh *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* adalah sebagai berikut:

- (1) Meletakkan persamaan (*musawah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- (2) Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya atau *'Adam al- haraj*.
- (3) Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat tersebut atau *Tahqiq al-'Adalah*
- (4) Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan atau *Jalb Almasalih Wa daf' al-Mafasi* ⁶⁵.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa kedudukan *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* dalam pemerintahan sangatlah penting selain berfungsi sebagai orang yang cakap dalam memilih Khalifah juga berfungsi sebagai pengawas pemerintah dalam menjalankan kebijakan negara, agar tidak terjadi penyimpangan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang ada atau kebijakan negara yang telah diputuskan.

⁶⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*..., hal. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Pemilihan *Ahl al Halli Wal Aqdi*

Berangkat dari praktik yang dilakukan oleh Khulafa' al Rasyidun bahwa para Ulama Siyasah merumuskan pandangannya tentang *Ahl al Halli wal Aqdi*, dengan Empat cara pemilihan yang berbeda- beda, dipilih oleh pemuka umat Islam untuk menjadi Kepala Negara. Selanjutnya pemilihan ini diikuti dengan sumpah setia (bay'ah) umat Islam secara umum terhadap Khalifah terpilih. Berdasarkan cara-cara tersebut, Al-Mawardi menguraikan perbedaan pendapat ulama tentang berapa jumlah *Ahl al Halli Wal Aqdi* yang dapat dikatakan sebagai representasi pilihan rakyat untuk mengangkat Kepala Negara. Menurutny, sebagian ulama memendang pemilihan kepala negara baru sah apabila dilakukan oleh Jumhur *ahl al Halli Wal Aqdi*. Ini sesuai sesuai dengan pemilihan Abu Bakar yang di bay'ah dengan aklamasi oleh umat Islam yang hadir di Sakifah Bani Sa'idah. Pendapat lain mengatakan cukup dipilih oleh lima orang anggota *Ahl al Halli Wal Aqdi*. Dalam kasus pemilihan Abu Bakar, sebelum di bay 'ah ia terlebih dahulu dipilih oleh lima orang sahabat, yaitu ;

- a. Umar Ibn Al- Khathab
- b. Abu Ubaidah Ibn Al- Jarrah
- c. Asyid Ibn Hudhair
- d. Basyir Ibn Sa' ad dan Salim Mawla Abi Hudhzaifah

Merekalah yang mula-mula melakukan bay'ah kepada Abu Bakar dan dilakukan oleh umat Islam lainnya. Demikian pula dalam pemilihan Usman Ibn Affan melalui musyawarah lima sahabat senior menurut pendapat Al-Mawardi dan pendapat Ulama Fiqh dan Mutakallimun dari Bashrah. Sementara Ulama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kufah berpendapat bahwa pemilihan kepala negara dinyatakan sah apabila dipilih oleh tiga orang anggota *Ahl al Halli Wal Aqdi*, mereka menganalogikakannya dengan sahnya akad nikah dengan seorang wali dan dua orang saksi.⁶⁶

Sayangnya, Al-Mawardi tidak menjelaskan secara memadai mengenai prosedur pemilihan *Ahl al Halli Wal Aqdi* dan hubungan lebih jauh dengan Khalifah. Berbeda dengan Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah mengembangkan konsep *Al-Syaukah* dalam teori politiknya, menurutnya *Ahl al Syaukah* adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan propesi dan mempunyai kedudukan terhormat dalam masyarakat dan ucapan mereka menjadi kata putus bagi masyarakat tersebut. Merekalah yang memilih kepala negara, dan Ibnu Taimiyah mencontohkan hal ini pada pemilihan Khalifah Abu Bakar dan Umar, menurutnya Abu Bakar memegang tampuk pemerintahan bukan karena bay'ah dan Umar memegang tampuk pemerintahan bukan karena wasiat Abu Bakar. Mereka naik memegang puncak pemerintahan Islam karena sumpah setia orang-orang yang memiliki kekuatan dan kemudian diikuti oleh umat Islam. Seandainya umat Islam tidak menyetujui Umar dan Abu Bakar, maka mereka berdua tidak akan mungkin dapat menjadi kepala negara.⁶⁷

Berdasarkan pandangan ini, Ibnu Taimiyah menolak keabsahan kekuasaan kepala negara yang dipilih oleh segelintir orang saja, seperti yang di teorikan Al-Mawardi di atas. Hal ini dapat menjurus kepada pembenaran kepala negara yang mencapai kekuasaannya dengan cara –cara paksa dan ilegal.

⁶⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hal 138

⁶⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hal. 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pandang Ibnu taimiyah di atas dapat ditarik benang merah bahwa sebenarnya ia tidak menolak substansi *Ahl al Halli Wal Aqdi*, yang mereka tolak adalah keberadaannya dalam sejarah Islam yang hanya menjadi alat bagi penguasa, para anggota *Ahl al Halli Wal aqdi* pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbas tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan . karenanya, Ibnu Taimiyah menginginkan peran *Ahl al Halli Wal Aqdi* yang lebih luas yang mencerminkan representasi kehendak rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan pihak yang paling berhak menentukan kepala negara dan menyalurkan aspirasinya kepada *Ahl al Halli Wal Aqdi* yang dalam teori Ibnu Taimiyah disebut *Al-Syawkah*.

Sayangnya baik Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah maupun pemikir politik lainnya pada periode Klasik dan Pertengahan tidak mengolaborasikan lebih jauh tentang mekanisme dan prosedur pemilihan *Ahl al Halli Wal Aqdi*. Barangkali Sistem Politik pada masa itu yang bercorak monarki menekankan kekuasaan kepala negara yang begitu luas.

Memang ada beberapa Ahli Tafsir yang mengidentikkan *Ahl al Halli Wal Aqdi* dengan Ulil Amri sebagaimana pendapat Al-Naisaburi, Al-Nawawi dan Muhammad Abduh. An-Naisaburi mengatakan bahwa *Ahl al Halli Wal Aqdi* adalah orang – orang yang terhormat dan berpikiran luas, dan An-Nawawi mengidentikkan nya sebagai para pemimpin dan tokoh masyarakat, sementara Muhammad Abduh, sebagaimana di tulis muridnya Rasyid Ridha, bahkan merinci komponen *Ahl al Halli Wal Aqdi* yaitu para Amir, Hakim , Ulama , Panglima Perang, dan semua Pimpinan yang menjadi rujukan semua umat Islam dalam



masalah semua kemashlahatan umum.⁶⁸ Sedangkan Hasan Albana mengelompokkan *Ahl al Halli Wal Aqdi* yaitu Fakih yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan melakukan ijtihad, orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat dan orang yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala suku atau golongan.⁶⁹

Dalam sejarah Islam, pembentukan Lembaga *Ahl al Halli Wal Adi* pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Khalifah Hakam II membentuk Majelis Syura yang beranggotakkan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota Majelis Syura setingkat dengan pemerintah, Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi Ketua Lembaga masalah Hukum dan membantu Khalifah dalam melaksanakan pemerintahan negara. Jadi Daulah Umayyah II di Spanyol menghidupkan lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah Politik Islam sejak zaman Mu'awiyah yang berkuasa di Damaskus.

Pembentukan Lembaga *Ahl al Halli Wal Aqdi* dirasa perlu dalam Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus di putuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemashlahatan umat Islam. Para ahli Fiqh Siyasyah menyebutkan beberapa alasan pentingnya kelembagaan Majelis Syura yaitu :

Rakyat Secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembetukan Undang-Undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah

⁶⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasyah...*, hal. 142

⁶⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasyah...*, hal. 143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan Perundang Undangan.

Secara individual rakyat tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat, apalagi pasti ada diantara mereka yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis, mereka tentu tidak dapat mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hal ini dapat mengganggu berbagai aktifitas kehidupan masyarakat.

Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila pesertanya terbatas, kalau seluruh rakyat di kumpulkan di suatu tempat untuk melakukan musyawarah, di pastikan musyawarah tidak dapat terlaksana.

4. Kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* hanya bisa dilakukan pemerintah dan rakyat
5. Kewajiban taat kepada Ulil Amri baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh Lembaga Musyawarah.

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh politik barat terhadap Islam, pemikiran *Ahl al Halli Wal Aqdi* juga berkembang. Para Ulama Siyasah mengemukakan pentingnya pembentukan Lembaga Perwakilan Rakyat atau DPR/MPR sebagai representasi dari kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang *Ahl al Halli Wal Aqdi* ini dengan mengombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di Barat. Dalam praktiknya mekanisme pemilihan anggota *Ahl al Halli Wal Aqdi* atau DPR menurut Al- Ansari dilakukan dengan beberapa cara :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *Ahl al Halli Wal Aqdi* sesuai dengan pilihannya
- 2) Pemilihan anggota *Ahl al Halli Wal Aqdi* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas dan pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang di pilih menjadi *Ahl al Halli Wal Aqdi*.
- 3) Disamping itu ada juga anggota *Ahl al Halli Wal Aqdi* yang di angkat oleh kepala negara.⁷⁰

Diantara ketiga cara demikian, cara pertamalah yang lebih kecil kelemahannya, karena cara ini mencerminkan kehendak rakyat secara bebas, mereka tidak perlu takut untuk memilih siapa calonnya yang akan mewakilinya, sesuai dengan pemilihan terbaiknya. Sedangkan cara kedua sangat subjektif sehingga bisa menimbulkan penyimpangan. Sementara cara ketiga tidak kondusif bagi independensi anggota *Ahl al Halli Wal Aqdi* untuk bersikap kritis terhadap penguasa, karena ia di angkat oleh Kepala Negara.

⁷⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah...*, hal. 144-145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya, maka bagian penutup ini akan diungkapkan beberapa kesimpulan yang dianggap penting diantaranya:

1. Alasan diperbolehkannya mantan narapidana menjadi anggota legislatif adalah Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang dijamin oleh UUD 1945, karna adanya pembatasan hak mantan narapida dalam Undang-Undang sebelumnya (UU No 12 Tahun 2008) yang bertentangan dengan UUD 1945.
2. Dalam Konsep Siyasah Islamiah terhadap Pasal 12 Huruf g dan Pasal 51 ayat 1 huruf g UU No 8 Tahun 2012, bahwasanya UU No 8 Tahun 2012 telah mengembalikan hak-hak rakyat yakni hak seorang mantan narapidana untuk ikut berpartisipasi dalam politik dan hak yang sama dihadapan hukum. Ketika seorang yang pernah melakukan kejahatan kemudian ia bertaubat sungguh-sungguh yakni dengan tidak mengulang kembali kejahatan yang dulu pernah diperbuatnya, maka sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus dosa sebagaimana dijelaskan dalam Al- Qur'an Surah An-Nisa' ayat 110 dan Surah Al-Imran ayat 135-136. Jadi, ketika dia sudah bertaubat dan telah membayar semua kesalahannya di masa lalu yaitu dengan dipidana penjara, maka seorang mantan narapidana boleh menjadi anggota lembaga legislatif, artinya fiqih siyasah memandang bahwa mantan narapidana boleh menjadi anggota legislatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Adapun saran penulis setelah melakukan penelitian serta menganalisa secara mendalam dan hasilnya adalah:

1. Bagi anggota legislatif yang mempunyai wewenang dalam merumuskan dan menetapkan Undang-Undang agar selalu mempertimbangkan hak-hak rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bagi lembaga penyelenggara pemilu (KPU) agar dapat menjalankan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 ini secara teliti dalam menyeleksi para calon anggota legislatif dalam pemilihan umum nantinya, supaya tercapainya wakil-wakil rakyat yang kredibel dan berkapasitas tanpa mengurangi hak-hak masyarakat lainnya.
3. Untuk para Mahasiswa yang latar belakangnya adalah Mahasiswa Syariah khususnya siyasah agar lebih meningkatkan pemahamannya mengenai hukum dan perpolitikan islam yang berkaitan dengan Undang-undang mengingat generasi sekarang adalah harapan pembangunan negara masa depan. Agar lebih memperkaya lagi pengetahuan tidak hanya dasar keilmuan yang dipelajari dibangku kuliah saja tetapi musti dilengkapi dengan informasi *terupdate* mengenai lembaga legislatif nantinya

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad ad Da'ur, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah cet. I 2002.
- Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Ter, Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamiludin Nurdin, Darul Falah, Jakarta, 2007.
- Al-Maududi Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, Terj, Asep Hikmat, Mizan, Bandung 1990.
- A.H. Dzajuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariat*, Kencana Media Grup, Jakarta: 2003.
- B. Abu Daud Busroh, *ilmu negara*, Bumi Aksara, Jakarta: 2001
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2000.
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Terjemahan Faturrahman A. Hamid, amzah, Jakarta: 2005.
- Hamdullah, dkk, *Politik Islam Konsepsi dan Dokumentasi*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987.
- Hasbi Assidqi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta: 1974.
- Isma'il Mahmood, Mohammad Zaini Yahaya & Mat Noor Mat Zain. . *Usul fiqh 1*, Universiti Kebangsaan, Malaysia: 2003.
- Kamsil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1989.
- Legowo dan Sebastian Salang, *Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DPD/PRD Menghadapi Pemilu*, pranita offset, Jakarta: 2008
- Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pretama, Jakarta: 2007.
- Mariam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2008.
- Muhammad Nasir, *Metodologi Research*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1988.
- M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Gema Insani, Jakarta: 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Naskah Akademik, *Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2010.

Prasetyo Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, DIA FISIP UI, Jakarta: 2006.

Sayuti Pulungan, *Fiqh Siasah; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: Persada, 1994.

Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an, Dibawah Naungan Al-Quran*, Ter, As'ad Yasin, Dkk, Gema Insani Press, Jakarta, 2004.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta: 1988.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Bukittinggi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir dan Skripsi*, IAIN Bukittinggi Press, Bukittinggi: 2015.

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, Sekkreteriat Jendral MPR RI, 2012

Undang-Undang No 8 Tahun 2012 *Tentang Pemilu DPR, DPRD, dan DPD*, Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 *Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123.

Penjelasan Atas UU No 8 Tahun 2012 *Tentang Pemilu DPR, DPRD, dan DPD*, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 5316.

Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 *Tentang Syarat Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Pidana Penjara Bagi Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD*,

<http://www.radariogja.co.id/berita/utama/2801-robertus-adji-yang-membuat-para-mantan-napi-bisa-maju-jadi-caleg-.html>

<http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/27/Nasional/krn.20090327.160666.id.html>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18639/mantan-napi-haram-menjadi-wakil-rakyat>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **"TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP MANTAN NARAPIDANA MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF (STUDY ANALISIS UU NO 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD)"** yang ditulis oleh:

Nama : **GUSTIAR AGUS**
NIM : **11324105004**
Program Studi : **Hukum Tata Negara**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Selasa, 31 Desember 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Hajar, MAg


.....

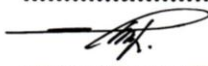
Sekretaris
Mutasir, SHI, M.Sy


.....

Penguji I
Drs. Zainal Arifin, MA


.....

Penguji II
Dr.H. Johari, M.Ag


.....

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syari'ah dan Hukum


Erni, S.Sos., M.M
NIP. 19680226 199103 2 002.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS

مكتبة الجامعة

UNIVERSITY LIBRARY

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani Tampan Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-7077837
Fax. 0761-21129 Web : www.lib.uin-suska.ac.id E-mail : lib@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

5075/Un.04/UPT.I/HM.02.1/09/2019

Kepala Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan
bahwa :

N a m a : Gustiar Agus
NIM : 11324105004
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara

Mengizinkan saudara yang bersangkutan untuk melakukan Riset / Penelitian
pada Perpustakaan UIN Suska Riau terhitung mulai tanggal 30 September 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.



Pekanbaru, 30 September 2019

Rasdanelis, S.Ag., SS., M.Hum.
NIP. 19730912 200003 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alaikum Wr. Wb



Penulis bernama **Gustiar Agus**, dilahirkan di Kabupaten Agam Kecamatan Kamang Mudik Desa Durian pada tanggal 18 Agustus 1993. Alm Ayahanda bernama Dalius dan Ibunda bernama Daliwarni. Penulis anak Delapan dari Delapan bersaudara. Jenjang pendidikan dimulai dari pendidikan di SD NEGERI 23 Tanjung Balau dari tahun 1999-2006, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS YATI Kamang Mudik dari tahun 2006-2009, dan melanjutkan di MTI CANDUANG Kecamatan Baso Kabupaten Agam dari tahun 2009-2013. Kemudian pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan hukum.

Dengan berkat rahmat Allah swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP MANTAN NARAPIDANA MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF (STUDY ANALISIS KU NO 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD)”** dibawah bimbingan bapak Firdaus SH, MH dan pada tanggal 2019 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dan menyandang gelar Sarjana Ekonomi (SE).